

PENGARUH SURAT KABAR NASIONAL TERHADAP KONDISI SOSIAL POLITIK DI YOGYAKARTA TAHUN 1950-1960

THE EFFECT OF NASIONAL NEWSPAPER ON THE SOCIAL POLITICAL CONDITIONS IN YOGYAKARTA 1950-1960

Oleh: Rinaldi Bagaskara, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, Rinaldibagaskara@gmail.com

Abstrak

Pengaruh pers berjalan sesuai dengan perkembangan sosial politik di Indonesia. Wilayah Yogyakarta pun berperan dalam bidang persuratkabaran. Munculnya surat kabar *Berita Nasional* pasca kemerdekaan telah memberikan pengaruh di Yogyakarta dan Indonesia, yaitu dengan menjadi media penyiaran informasi bagi masyarakat. Keadaan umum munculnya persuratkabaran di Yogyakarta dipengaruhi oleh kebutuhan informasi yang semakin meningkat. Surat kabar di Yogyakarta semakin berkembang setelah kaum pribumi ingin memerdekakan Indonesia, termasuk surat kabar *Nasional*. Dalam perkembangan surat kabar *Nasional* pada periode 1960-1970 dipengaruhi oleh keadaan sosial politik yang diterapkan di Indonesia, ini terbukti dalam penyajian beritanya. Surat kabar *Nasional* pun memberikan pengaruhnya bagi khalayak umum seperti menjadi sarana penyiaran dan penyebaran informasi. Selain itu, surat kabar *Nasional* sebagai surat kabar nasionalis memberikan pengaruhnya dalam mempertahankan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Peran surat kabar *Nasional* pun beragam. Dalam bidang sosial, peranan yang diberikan *Nasional* ialah menggerakkan rasa nasionalisme masyarakat Yogyakarta, sehingga masyarakat dapat menjaga dan mempertahankan Indonesia. Dalam bidang politik, surat kabar *Nasional* berperan sebagai perantara antara masyarakat dengan pemerintah, menyampaikan kebijakan pemerintah, bahkan mengkritik pemerintah bila sudah melenceng dari cita-cita bangsa Indonesia.

Kata Kunci *Surat kabar, Nasional, Yogyakarta*

Abstract

The influence of the press goes hand in hand with the socio-political development in Indonesia. The Yogyakarta region also plays a role in the field in the press. The emergence of the post-independence Nasional newspaper has had an influence in Yogyakarta and Indonesia, namely by coming an information media for the public. The general situation of the emergence of news in Yogyakarta is influenced by the increasing information needs. Newspaper in Yogyakarta are increasingly developing after indigenous people want to liberate Indonesia, including the Nasional newspaper. In the development of the Nasional newspaper in the period 1960-1970 influenced by the socio-political conditions applied in Indonesia, this was evident in the presentation of the news. Nasional newspaper also influence the general public such as being a means of broadcasting and disseminating information. In addition, the Nasional newspaper as a nationalist newspaper has had an influence in maintaining the sense of nationalism of the people of Yogyakarta, so yhat the community can maintain and maintain Indonesia. In the political field, the Nasional newspaper acts as an the government, conveying government policies, even criticizing the government if it has deviated from the ideals of the Indonesian people.

Keywords: Newspaper, Nasional, Yogyakarta

Pendahuluan

Lintasan sejarah tentang persuratkabaran sebelum tahun 1960 dimulai ketika masuknya mesin cetak ke Hindia Belanda pada tahun 1624 merupakan tonggak awal kemunculan pers berupa surat kabar di Hindia Belanda. Masuknya mesin cetak ke Hindia Belanda pada tahun 1624 merupakan tonggak awal kemunculan pers berupa surat kabar di Hindia Belanda. Mulai abad ke-18, pemerintah Hindia Belanda menerbitkan surat kabar yang diperuntukan khusus untuk negara, selanjutnya percetakan milik swasta yang berorientasi komersil mulai muncul pada abad ke-19. Selain di Jawa, pada masa itu juga muncul surat kabar di luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.¹

Suratkabar pada mulanya diterbitkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan politik yaitu menyebarkan propaganda kekuasaan Hindia Belanda serta untuk menguatkan legitimasi pemerintah Hindia Belanda atas wilayah jajahannya. Hal inilah yang membuat pemerintah Hindia Belanda mengambil langkah preventif di semua daerah dalam penerbitan suatu surat kabar agar tetap pada kendali mereka.

Surat kabar pertama kali terbit di Yogyakarta pada tahun 1877 berupa surat kabar berbahasa Belanda, yaitu surat kabar *Mataram*, kemudian disusul oleh surat kabar berbahasa Jawa yang bernama surat kabar *Darmawarsita* tahun 1879 dan surat kabar *Retnodhoemila* tahun 1895. Pada masa pergerakan nasional, pertumbuhan pers kaum pribumi semakin meningkat dengan pesat hingga masa pendudukan Jepang.

Pada tahun 1942, setelah Sekutu dikalahkan oleh Jepang, surat kabar di

Indonesia menjadi sukar didapatkan, termasuk di Yogyakarta. Hal ini dikarenakan surat kabar-surat kabar yang berbau Hindia Belandabanyak yang dilarang terbit. Hanya sedikit surat kabar yang diperbolehkan terbit oleh pemerintah Jepang, itupun harus mengikuti semua kebijakan yang telah diterapkan, termasuk surat kabar yang berada di Yogyakarta. Pelarangan terbitnya surat kabar oleh pemerintah Jepang dilakukan hingga Jepang mengalami kekalahan dari Sekutu pada tahun 1945.

Pasca kekalahan Jepang terhadap Sekutu, Indonesia kemudian memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Hal ini membuat Indonesia sah menjadi negara yang berdaulat, namun dalam kenyataannya pihak Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia tersebut dan berusaha untuk kembali menduduki Indonesia dengan cara menunggangi Sekutu melalui *NICA*. Peristiwa ini membuat keadaan Indonesia menjadi tidak stabil, sehingga pada 4 Januari 1946 Ibukota Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta.

Berpindahnya Ibukota Indonesia, membuat Yogyakarta menjadi salah satu wilayah penting pada waktu itu. Maka dari itu, mulai banyak muncul surat kabar-surat kabar di Yogyakarta guna memenuhi kebutuhan informasi di ibukota pada waktu itu. Pada 15 November 1946, muncullah surat kabar *Nasional*- pada perkembangannya akan berganti nama menjadi surat kabar *Nasional* yang didirikan oleh Mr. Soemanang. Tokoh-tokoh pers yang duduk dalam jajaran redaksi surat kabar *Nasional* saat itu antara lain Mashoed Hardjokoesoemo, Bob Maemun, Drs Marbangoen, Mohammad Soepadi, Darsyaf Rahman dan RM Soetio yang sekaligus menjadi

¹Taufik, I., *Sejarah Perkembangan Pers di Indonesia*, (Jakarta: PT Triyinc, 1977), hlm. 27.

Pemimpin Perusahaan.²

Mr Soemanang yang merupakan pendiri surat kabar *Nasional*, selain merupakan tokoh pergerakan dan wartawan senior, juga merupakan salah seorang pendiri Kantor Berita Antara bersama Adam Malik, Sipahutar dan Pandu Kartawiguna. Pada saat Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) didirikan, Mr Soemanang diberi kepercayaan untuk memegang jabatan sebagai tenaga juru penerangan PUTERA. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dikumandangkan, Mr Soemanang dan Mashoed Hardjokoesoemo dari Jawa Shinbun Kai, bertekad menerbitkan surat kabar harian. Setelah memperoleh kertas dan tinta dipersiapkan dan percetakan sederhana, maka diputuskan untuk segera menerbitkan surat kabar daerah di Yogyakarta. Yogyakarta yang pada saat itu menjadi Ibukota Pemerintahan Indonesia menjadi tempat diterbitkan surat kabar harian dengan nama *Nasional*.³

Pada awal kemerdekaan yang juga dikenal sebagai masa revolusi, surat kabar *Nasional* terbit dengan jumlah halaman yang terbatas dan tidak menentu, dua atau empat halaman saja. Bahkan tidak jarang terjadi, jika persediaan kertas habis, surat kabar *Nasional* terbit dengan kertas merang. Nasib serupa juga dialami oleh beberapa penerbitan lain pada saat itu yang terpaksa terbit dengan kertas merang. Sebagai surat kabar, sejak awal berdirinya *Nasional* selalu mengutamakan kepentingan nasional. Maka sekalipun pendirinya adalah seorang nasionalis yang merupakan anggota Partai Nasional Indonesia (PNI), namun ada pula wartawan-

wartawan yang merupakan anggota partai-partai lain, seperti dari Partai Masyumi.⁴

Perkembangan kondisi politik tanah air juga turut berpengaruh terhadap surat kabar *Nasional*. Pada tahun 1967, Presiden melalui Departemen Penerangan mengeluarkan kebijakan dan memutuskan bahwa setiap penerbitan harus berafiliasi (mendapat dukungan) dari partai politik atau organisasi massa anggota Front Nasional atau Pancasila.⁵ Kebijaksanaan ini diikuti dengan berafiliasinya surat kabar *Nasional* dengan Partai Nasional Indonesia (PNI). Kebijakan ini membawa konsekuensi bergantinya nama surat kabar *Nasional* menjadi *Suluh Indonesia (Sulindo)* edisi Yogyakarta. Dalam perkembangannya, ketika surat kabar *Suluh Indonesia* edisi Jakarta (nasional) berganti nama menjadi *Suluh Marhaen*, kemudian sejak 1 Juni 1966 surat kabar *Suluh Indonesia* edisi Yogyakarta pun ikut berganti nama menjadi *Suluh Marhaen* edisi Yogyakarta.⁶

Tragedi Nasional, Peristiwa G-30S/PKI, yang didahului gegap-gempitanya kompetisi Manipolis antara tiga kekuatan politik yang beraliran Nasionalis-Agama-Komunis (Nasakom), mempunyai akibat yang luas dalam perikehidupan politik di Indonesia. Surat kabar *Nasional* yang telah berganti

⁴Surat kabar *Nasional*, 15 November 1948.

⁵Ambar Adriananto, dkk, *Peranan Media Massa Lokal Bagi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Daerah*, (Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1997), hlm. 172.

⁶Surat Kabar *Suluh Marhaen*, 20 Agustus 1966.

²Surat kabar *Nasional*, 15 November 2015.

³Surat kabar *Komunitas Nagari*, 26 November 2018.

nama menjadi *Suluh Marhaen* edisi Yogyakarta mendapat ujian yang berat. Dampak perubahan politik yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia pada saat itu, juga dialami oleh surat kabar ini. Ada satu hal yang perlu dicatat, dan menjadi sebuah kesan yang mendalam sekaligus membanggakan bagi pengasuh penerbitan ini, yaitu surat kabar *Suluh Marhaen* edisi Yogyakarta tidak pernah ikut menyiarkan pembentukan dan susunan Dewan Revolusi.⁷

Dalam suasana jatuh bangun menghadapi berbagai kendala di bidang bisnis surat kabar, sejak berdirinya Surat kabar *Nasional* tanggal 15 November 1946 kemudian berganti nama menjadi *Sulindo* edisi Yogyakarta dan kemudian menjadi *Suluh Marhaen* edisi Yogyakarta hanya sehari saja surat kabar ini tidak terbit. Pemimpin Redaksi dan segenap staf redaksi menolak dengan tegas perintah untuk memuat pengumuman Dewan Revolusi yang dipaksakan oleh oknum militer pengikut G30S/PKI yang mendatangi secara langsung kantor Redaksi di Jalan Tanjung 21. Pemimpin Redaksi dan segenap staf redaksi justru memilih untuk tidak terbit, daripada memuat pengumuman tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 1969 Presiden melalui Departemen Penerangan mencabut segala ketentuan mengenai perusahaan pers termasuk mengenai ketentuan afiliasi dengan partai politik, maka *Suluh Marhaen* edisi Yogyakarta sejak tahun tersebut berganti nama menjadi *Nasional*.⁸

Metode Penelitian

Metode sejarah merupakan suatu proses untuk menguji dan

⁷Surat kabar *Nasional*, 15 November 2015.

⁸Ambar Adriananto, dkk, *Loc. Cit.*

mengkaji kebenaran rekaman sejarah dan peninggalan-peninggalan masa lampau dengan menganalisis secara kritis terhadap data yang ada sehingga menjadi penyajian dan cerita yang dapat dipercaya.⁹Metode sejarah juga dapat merekonstruksi sebanyak-banyaknya peristiwa masa lampau manusia.¹⁰ Penelitian ini menggunakan empat tahapan penelitian. Empat tahapan penelitian menurut Kuntowijoyo yang digunakan pada penelitian ini antara lain; pengumpulan data (Heuristik), kritik sumber (Verifikasi), penafsiran (Intepretasi), dan penulisan sejarah (Historiografi).¹¹

Heuristik merupakan tahap awal dalam melakukan penelitian sejarah, yaitu suatu kegiatan yang mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data atau materi sejarah. Tahap kedua kritik sumber adalah upaya untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber. Kritik sumber terbagi menjadi dua, yaitu kritik internal dan kritik eksternal. Tahap ketiga interpretasi adalah penafsiran terhadap fakta-fakta yang sudah diperoleh melalui tahap kritik sumber. Melalui tahap interpretasi kemampuan intelektual sejarawan benar-benar diuji dikarenakan tahapan ini sering dijadikan pemicu subjektivitas. Tahap terakhir historiografi merupakan proses menceritakan rangkaian fakta dalam sebuah bentuk tulisan yang

⁹Helius Sjamsuddin dan Ismaun, *Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Depdikbud, 1996), hlm. 61.

¹⁰Nugroho Notosusanto, *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah* (Jakarta: Mega Book Store, 1984), hlm. 22-23.

¹¹Abd Rahman Wahid dan Muhammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 43.

bersifat historis, ditulis dengan kronologis berdasarkan hasil yang didapat peneliti setelah melewati tahap heuristik, kritik sumber dan interpretasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Munculnya Surat Kabar Di Indonesia

Munculnya pers berupa surat kabar di Indonesia berjalan beriringan dengan ekspansi bertahap Bangsa Belanda.¹² Dalam perkembangannya, pers di Hindia Belanda dibagi menjadi tiga babak. Babak pertama yaitu tahun 1744-1854, dibabak pertama ini Bangsa Belanda dan orang-orang Eropa masih mendominasi dunia pers di Hindia Belanda. Babak kedua yaitu tahun 1854-1907, pada babak ini kaum pribumi mulai terlibat dalam dunia pers. Terakhir pada babak yang ketiga yaitu tahun 1907-1945, pers semakin berkembang sebagai alat politik kaum pribumi dalam mempropagandakan nasionalisme dan semangat kebangsaan.¹³

Pada periode awal, surat kabar yang muncul di Hindia Belanda dimulai pada masa VOC. Berawal dari para *zending*¹⁴ yang memperkenalkan mesin

cetak ke Hindia Belanda tahun 1624. Fungsi sebenarnya mesin cetak yang dibawa oleh para *zending* ini adalah untuk mencetak kitab-kitab guna penyebaran agama, namun kenyataannya mesin cetak ini tidak berguna karena tidak adanya tenaga terampil dan ahli. Baru pada abad ke-18, tepatnya tahun 1744 mesin cetak mulai digunakan kembali karena telah mulai muncul tenaga terampil dan ahli di Hindia Belanda. Mesin cetak ini kemudian digunakan untuk menerbitkan surat kabar pertama yang khusus diterbitkan untuk negara dan untuk sebagian kecil orang-orang Eropa, yaitu surat kabar *Bataviase Nouvelles*.

Banyaknya surat kabar berbahasa Belanda yang muncul, baik yang diterbitkan oleh negara maupun oleh swasta membuat perkembangan surat kabar di Hindia Belanda pun semakin pesat. Tahun 1854, pers mulai masuk pada babak kedua, dimana pada awal babak kedua ini pemerintah Hindia Belanda mulai merancang Undang-Undang Pers yang berguna untuk menekan laju suatu surat kabar yang dapat membahayakan posisi mereka di Hindia Belanda. UU Pers yang resmi digunakan di Hindia Belanda baru selesai dibuat tahun 1856 dan dinamakan UU Pers 1856. Sebelum itu, ketika pertengahan tahun-tahun pembuatan UU Pers 1856, kaum pribumi berhasil menerbitkan surat kabar berbahasa daerah (Jawa) yang pertama di Hindia Belanda. Surat kabar tersebut bernama surat kabar *Bromartani*.¹⁵

Pers berkembang dengan lambat di kalangan pribumi. Hal ini dikarenakan pada tahun-tahun sebelum abad ke-20, surat kabar yang murni terbitan kaum pribumi dapat dikatakan belum ada, meskipun telah muncul surat kabar berbahasa Melayu dan berbahasa

¹²Ahmat Adam, *Sejarah Awal Pers Dan Kesadaran Keindonesiaan*, (Jakarta: Hasta Mitra, 2003), hlm. 1.

¹³Mega Puspita Prinandani, *Perkembangan Surat Kabar Retnodhoemilah Pada Masa Kepemimpinan Wahidin Soedirohoesodo (1901-1906)*, *Skripsi*, (Yogyakarta: UNY, 2015), hlm. 31.

¹⁴Menurut Kamus Bahasa Indonesia, *zending* merupakan badan-badan penyelenggara (misi) penyebaran agama Kristen. Lihat Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, 2008), hlm. 1632.

¹⁵Ahmat Adam, *op. cit.*, hlm. 27-35.

Jawa serta sudah adanya redaktur dari kaum pribumi. Awal abad ke-20 bisa dikatakan telah memasuki babak ketiga. Pada masa ini pers kemudian menjadi bagian penting dalam perjuangan kaum pribumi, di pelopori oleh Raden Mas Tirto Adhi Soerjo yang mendirikan penerbitan surat kabar *Soenda Berita* dan surat kabar *Medan Prijaji*. Hal tersebut kemudian terus berkembang dengan pesat di Hindia Belanda.

Bagi wilayah Yogyakarta, sejarah perkembangan surat kabar diawali dengan munculnya surat kabar berbahasa Belanda, yaitu surat kabar *Mataram* tahun 1877. Berselang dua tahun muncullah surat kabar berbahasa Jawa yang pertama di Yogyakarta, yaitu surat kabar *Darmawarsita* tahun 1879 dan disusul oleh surat kabar *Retnodhoemilah* tahun 1895. Dalam perkembangannya, surat kabar di Yogyakarta semakin banyak bermunculan, apalagi setelah diterapkannya kebijakan politik etis. Salah satu surat kabar yang muncul pasca diterapkannya politik etis ialah surat kabar *Sedyo Tama*. Surat kabar *Sedyo Tama* merupakan surat kabar yang didirikan oleh pra pemuda Yogyakarta yang tidak terikat dengan organisasi manapun. Hingga masa pendudukan Jepang tahun 1942, surat kabar yang mampu bertahan di Yogyakarta ialah surat kabar *Mataram*, surat kabar *Djogja Bode*, surat kabar *Kawoela*, dan surat kabar *Sedyo Tama*.¹⁶ Selain surat kabar tersebut, semua surat kabar telah tutup karena dipengaruhi oleh berbagai faktor.

B. Sejarah Berdirinya Surat Kabar Nasional di Yogyakarta

Pasca kekalahan Jepang terhadap Sekutu, Indonesia kemudian

¹⁶ Abdurrachman Soerjomihardjo, *op. cit.*, hlm. 192-194.

memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Hal ini membuat Indonesia sah menjadi negara yang merdeka, namun dalam kenyataannya pihak Belanda tidak mengakui kemerdekaan tersebut dan berusaha untuk kembali mendudukinya dengan cara menunggangi Sekutu melalui *NICA (Netherlands Indies Civil Administration)*, Indonesia pun kemudian mulai memasuki masa revolusi fisik. Dalam masa revolusi fisik, pers Indonesia terbagi menjadi dua golongan, yaitu pers yang terbit di daerah kekuasaan pendudukan Sekutu dan pers yang terbit di daerah kekuasaan Indonesia, keduanya disebut pers Republikan yang menjadi lawan dari pers *NICA*. Pada masa revolusi fisik ini, surat kabar *Nasional* memiliki kedudukan yang penting, yaitu memberitakan tentang situasi, kondisi dan keadaan yang sedang terjadi di Yogyakarta.¹⁷

Pada peristiwa Agresi Militer pertama membuat keadaan Indonesia menjadi tidak stabil, sehingga pada 4 Januari 1946 Ibukota Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Berpindahnya Ibukota Indonesia, membuat Yogyakarta menjadi salah satu wilayah penting pada waktu itu. Maka dari itu, mulai banyak muncul surat kabar-surat kabar di Yogyakarta guna memenuhi kebutuhan informasi di ibukota pada waktu itu.¹⁸

Pada 15 November 1946, terbitlah surat kabar *Nasional* yang pada perkembangannya akan berganti nama menjadi surat kabar *Nasional* yang didirikan oleh Mr Soemanang.

Fungsi lain dari surat kabar *Nasional* pada masa revolusi fisik ini

¹⁷ Abdul Haris Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, (Jakarta: Tanpa Penerbit, 1973), hlm 135-137.

¹⁸ *Ibid.*

ialah memberitakan segala sesuatu yang sedang terjadi, seperti kondisi dan situasi di Yogyakarta maupun Indonesia kepada masyarakat di kota tersebut. Kegiatan tersebut dilakukan supaya masyarakat Yogyakarta dapat mengetahui informasi yang sedang terjadi, baik di Yogyakarta maupun diseluruh Indonesia. Selain itu, fungsi lain dari penyebaran berita melalui surat kabar *Nasional* kepada masyarakat ialah mereka menjadi dapat ikut berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Berakhirnya masa revolusi fisik, Indonesia mulai memasuki sistem pemerintahan yang baru, yaitu Demokrasi Liberal. Memasuki sistem pemerintahan yang baru ini, keadaan di Indonesia berangsur-angsur mengalami perubahan kearah yang semakin baik dan semakin teratur. Pada sistem Demokrasi Liberal ini banyak perubahan yang terjadi di Indonesia, termasuk dalam bidang persuratkabaran. Dalam bidang persuratkabaran, pers di Indonesia pada sistem pemerintahan ini dijamin dan dilindungi kebebasannya, sehingga memiliki kebebasan baik dalam hal penerbitan maupun pencarian dan penyebaran berita. Berkat itu, surat kabar Nasional dapat menerbitkan 3000 sampai 4000 eksemplar/hari.¹⁹Telah disebutkan di atas, meskipun pada sistem Demokrasi Liberal ini surat kabar diberikan kebebasan, namun surat kabar-surat kabar di Indonesia pada masa ini terlalu bebas dan tidak memiliki batasan-batasan, adapula yang mulai ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan suatu golongan tertentu. Terlalu bebasnya pers pada masa ini membuat pers mulai meninggalkan norma-norma ketimurannya, untuk mengatasi hal tersebut tahun 1957 pemerintah mengeluarkan SOB (*Staat van Oorlog*

en Beleg)²⁰ untuk membatasi surat kabar-surat kabar yang telah melampaui batas-batas norma ketimuran.

Pada 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan dekrit yang isinya mengembalikan dasar negara Indonesia dari UUDS 1950 menjadi UUD 1945 dan membubarkan Konstituante. Kembali dipergunakannya UUD 1945 membawa Indonesia memasuki periode baru dalam sistem pemerintahannya, yaitu sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin atau masa Orde Lama. Pada sistem Demokrasi Terpimpin ini pula presiden menerapkan kebijakan Manipol USDEK (Manifesto Politik, UUD 1945, Sosialisme, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi, dan Kepribadian Indonesia).²¹Pada sistem pemerintahan ini semua surat kabar yang terbit di Indonesia harus memiliki Surat Izin Terbit (SIT). Kebijakan ini diberlakukan supaya tidak terulang kembali bentuk pers yang terlampau bebas, kebijakan ini merupakan kebijakan lanjutan dari SOB. Selain itu, fungsi dari Surat Izin Terbit juga untuk mendukung kebijakan Manipol USDEK.

Tragedi nasional G30S/PKI memberikan akibat yang luas dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Peristiwa ini membuat surat kabar *Nasional* mendapat ujian yang berat. Dampak perubahan politik yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia pada saat itu, juga dialami oleh surat kabar *Nasional*. Ada satu hal yang perlu

²⁰SOB (*Staat van Oorlog en Beleg*) atau keadaan darurat perang, merupakan suatu pernyataan pemerintah yang dapat mengatur pemerintahan dan aktivitas warganya. Lihat I. Taufik, *Sejarah Dan Perkembangan Pers Di Indonesia*, (Jakarta: PT Triyinc, 1977), hlm. 72.

²¹Surat kabar *Nasional*, 1 November 1960.

¹⁹Ambar Adriananto, *Op. Cit.*, hlm. 165.

dicatat dan menjadi sebuah kesan yang mendalam sekaligus membanggakan bagi pengasuh penerbitan ini, yaitu surat kabar *Nasional* tidak pernah ikut menyiarkan pembentukan dan susunan Dewan Revolusi.²² Segenap staf redaksi menolak dengan tegas perintah untuk memuat pengumuman Dewan Revolusi yang dipaksakan oleh pengikut G30S/PKI yang mendatangi secara langsung kantor redaksi di Jalan Tanjung 21. Segenap staf redaksi justru memilih untuk tidak terbit, daripada memuat pengumuman tersebut. Dalam suasana jatuh bangun, menghadapi berbagai kendala di bidang bisnis surat kabar, sejak berdirinya surat kabar *Nasional* pada tanggal 15 November 1946, penerbitan ini hanya sekali absen untuk tidak terbit, yaitu ketika peristiwa G30S/PKI tersebut.²³

Pasca peristiwa tersebut, surat kabar *Nasional* terbit kembali dengan memberitakan mengenai hal-hal yang terjadi pasca peristiwa G30S/PKI. Tetapi dalam pemberitaannya, surat kabar *Nasional* sangat berhati-hati, mengingat mereka berhaluan nasionalis, maka dari itu supaya tidak menimbulkan kontroversi dalam pemberitaannya, surat kabar *Nasional* hanya memberitakan berita yang kejadiannya sudah benar-benar jelas saja, seperti pembubaran PKI.²⁴

Akhirnya setelah banyak gejolak yang terjadi pada masa peralihan, pergantian sistem pemerintahan dari Orde Lama menjadi Orde Baru pun resmi diterapkan di Indonesia tahun 1967. Soeharto selaku presiden pengganti Soekarno pun kemudian

meneruskan pembangunan Indonesia. Dalam hal ini, surat kabar *Nasional* pun tak luput dalam memberitakan mengenai pergantian kepala negara Indonesia tersebut. Pada masa awal Orde Baru, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan dalam bidang persuratkabaran. Hal ini dilakukan supaya keadaan yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin tidak terulang kembali, seperti pers yang terlalu dikekang oleh kebijakan yang diterapkan pada masa itu.

Pemerintah pun mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk penertiban melalui Departemen Penerangan (Deppen) dengan maksud untuk mengarahkan surat kabar supaya berfungsi lebih tegas sebagai alat perjuangan dan alat revolusi dalam membangun Indonesia. Penerapan dari kebijakan ini ialah semua penerbitan surat kabar harus ikut dalam suatu golongan tertentu atau langsung di bawah naungan Deppen tanpa terkecuali, termasuk surat kabar *Nasional*.²⁵

Kebijakan ini diikuti dengan berafiliasinya surat kabar *Nasional* dengan Partai Nasional Indonesia (PNI). Kebijakan ini membawa konsekuensi bergantinya nama surat kabar *Nasional* menjadi surat kabar *Suluh Indonesia* (Sulindo), edisi Yogyakarta. Lalu karena surat kabar *Suluh Indonesia* yang berada di Jakarta berganti nama menjadisurat kabar *Suluh Marhaen*, sejak 1 Juni 1967 surat kabar *Suluh Indonesia* yang berada di Yogyakarta pun juga berganti nama menjadisurat kabar *Suluh Marhaen*. Bergantinya nama dikarenakan landasan dasar politik penerbitan tersebut adalah nasionalis. Adapun waktu itu kebanyakan dari redaktur surat kabar *Suluh Marhaen* ialah para

²²Surat kabar *Komunitas Nagari*, 26 November 2018.

²³Phutut Wiryawan, Wawancara di Yogyakarta, 7 Januari 2019.

²⁴Surat kabar *Suluh Indonesia*, 14 Maret 1966.

²⁵Ambar Adriananto, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 172.

nasionalis pendukung Soekarno.²⁶

Selama kurang lebih tiga tahun, pemberitaan dalam surat kabar-surat kabar dapat dikatakan standar-standar saja atau terkesan *flat*. Ini menyebabkan penurunan surat kabar yang diterbitkan, yang tadinya dapat terbit 3000 sampai 4000/eksemplar kemudian turun menjadi 2500 sampai 3000 eksemplar/hari.²⁷ Dalam perkembangan selanjutnya yaitu pada tahun 1969, Presiden melalui Departemen Penerangan mencabut segala ketentuan mengenai perusahaan pers termasuk mengenai ketentuan afiliasi dengan partai politik, maka surat kabar *Suluh Marhaen* sejak tahun tersebut telah lepas dari PNI sebagai afiliasinya, dan kembali berjuang secara mandiri dalam bidang persuratkabaran. Meskipun haluan dasar politiknya tetap nasionalis.²⁸

C. Peranan Surat Kabar Nasional di Yogyakarta

Menyerahnya Jepang kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945, mengakhiri Perang Asia Timur Raya dan mengakhiri pula kekuasaan Jepang atas Indonesia selama kurang lebih 3,5 tahun. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia kemudian memproklamasikan kemerdekaannya. Peranan yang dilakukan oleh surat kabar di Indonesia pada masa awal kemerdekaan ialah memperjuangkan dan mempertahankan Republik Indonesia yang baru lahir tersebut. Bahkan ada beberapa wartawan yang langsung turun ke lapangan untuk

menggalang semangat masyarakat Indonesia guna mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengetahui ampuhnya surat kabar dalam mempengaruhi kalayak umum, maka mulai banyak penerbitan surat kabar yang muncul di Indonesia.²⁹

Bagi wilayah Yogyakarta, terdapat surat kabar yang terbit pada 15 November 1946, surat kabar tersebut yaitu surat kabar *Nasional*. Surat kabar *Nasional* berperan penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, khususnya yang berada di Yogyakarta. Surat kabar *Nasional* ketika pertama kali terbit langsung berperan untuk memberitakan mengenai kemerdekaan Indonesia di wilayah Yogyakarta. Bahkan pada masa revolusi fisik, surat kabar *Nasional* selalumenerbitkan surat kabarnya meskipun dalam keadaan yang sulit. Diterbitkannya surat kabar Nasional ialah berperan dalam memberikan informasi mengenai situasi, kondisi dan keadaan di Yogyakarta pada waktu itu kepada masyarakat Yogyakarta.³⁰ Masyarakat Yogyakarta yang telah membaca berita dari surat kabar *Nasional* pun semakin tergugah rasa nasionalisme, sehingga masyarakat Yogyakarta banyak yang ikut serta dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Ketika Yogyakarta menjadi Ibukota Republik Indonesia, surat kabar *Nasional* menjadi surat kabar yang penting di Yogyakarta, sehingga surat kabar *Nasional* menjadi salah satu surat kabar dicari oleh masyarakat Yogyakarta pada waktu itu. Hal tersebut membuat surat kabar *Nasional* menjadi lebih mudah dalam melaksanakan

²⁶Surat kabar *Suluh Marhaen*, 26 dan 29 Agustus 1966.

²⁷Ambar Adriananto, Op. Cit., hlm. 166-167.

²⁸Ambar Adriananto, dkk, *Loc. Cit.*

²⁹Ari Sugiarto, Wawancara di Yogyakarta, 14 Desember 2018.

³⁰Phutut Wiryawan, Wawancara di Yogyakarta, 7 Januari 2019.

perannya sebagai penyebar informasi. Ketika terjadi Agresi Militer Belanda II, Masyarakat Yogyakarta mengalami kesukaran dalam mendapatkan informasi karena penerbitan surat kabar diserang dan diduduki oleh Belanda.³¹ Tetapi hal tersebut tidak menyurutkan niat penerbitan surat kabar *Nasional* untuk tidak terbit, surat kabar tersebut tetap terbit. Tetap terbitnya surat kabar *Nasional* membuat para pembaca di Yogyakarta tidak ketinggalan informasi mengenai peristiwa yang sedang terjadi. Disisi lain, para redaktur surat kabar *Nasional* berinisiatif untuk bergerilya dalam mencari berita supaya di Yogyakarta tetap mendapatkan informasi.³² Informasi yang diberikan kepada masyarakat Yogyakarta berdampak kepada semakin banyak masyarakat yang ikut dalam membela dan mempertahankan tanah air supaya tidak kembali dikuasai oleh pihak Belanda.

Pasca masa revolusi fisik, Indonesia memasuki sistem pemerintahan Demokrasi Liberal. Pada masa ini surat kabar *Nasional* muncul sebagai surat kabar yang memiliki peran penting di Yogyakarta, sebab surat kabar *Nasional* merupakan surat kabar yang tetap berusaha untuk mempertahankan gagasannya sebagai surat kabar yang bersikap nasionalis. Peran dari surat kabar *Nasional* salah satunya ialah memberikan informasi yang tetap dalam haluan dasarnya untuk masyarakat Yogyakarta, meskipun pada masa ini

surat kabar *Nasional* juga mulai digerogeti oleh ideologi dari golongan tertentu. Berkat keteguhannya untuk tetap menjadi surat kabar yang berhaluan nasionalis, jadi surat kabar *Nasional* tetap dapat bertahan.³³ Bagi pelanggan surat kabar *Nasional*, sikap nasionalis dari surat kabar *Nasional* membuat masyarakat Yogyakarta tetap mempercayai berita yang diberikan oleh surat kabar tersebut sebagai sumber informasi.

Pasca sistem pemerintahan Demokrasi Liberal berakhir dengan ditandai Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kemudian Indonesia memasuki sistem pemerintahan yang baru, yaitu sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin atau masa Orde Lama. Dalam sistem pemerintahan ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan Manipol Usdek³⁴. Ini dapat ditemukan dalam salah satu *headline*-nya yang tertulis "Petugas Negara Harus Mengerti-Jakin dan mentjintai Manipol/USDEK". Selanjutnya mewajibkan setiap penerbitan surat kabar memiliki Surat Izin Terbit (SIT). Surat kabar *Nasional* pun mempunyai inisiatif supaya tidak diberedel oleh pemerintah, yaitu lebih kooperatif dalam pemberitaannya tetapi informasi yang diberikan tetap komprehensif.³⁵ Ketika pada masa Demokrasi Terpimpin ini, sebenarnya masyarakat Yogyakarta sedikit kehilangan berita-berita yang penting, karena dibatasinya surat kabar-surat kabar. Tetapi masyarakat tetap percaya, khususnya para pembaca dari surat kabar *Nasional* bahwa berita-berita yang diterbitkan tetap dapat memenuhi

³¹Philipus Jehamun, Wawancara di Yogyakarta, 26 November 2018.

³²Ambar Adriananto, dkk, *Peranan Media Massa Lokal Bagi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Daerah*, (Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1997), hlm. 174.

³³Philipus Jehamun, Wawancara di Yogyakarta, 26 November 2018.

³⁴Suat kabar *Nasional*, 1 November 1960.

³⁵Ari Sugiarto, Wawancara di Yogyakarta, 14 Desember 2018.

kebutuhan informasi.

Peran surat kabar *Nasional* pada sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin ini mulai sedikit redup ketika terjadi peristiwa G30S/PKI. Ini dikarenakan Surat kabar *Nasional* memilih untuk tidak terbit ketika terjadi peristiwa yang kontroversial tersebut. Hal ini disebabkan pasca peristiwa tersebut, sedikit sekali surat kabar yang berani memberitakan mengenai peristiwa tersebut karena banyak surat kabar yang belum mengetahui peristiwa yang sebenarnya terjadi serta belum memiliki informasi yang cukup untuk dijadikan bahan berita yang komprehensif sehingga mereka belum berani menerbitkan berita mengenai peristiwa G30S/PKI, termasuk surat kabar *Nasional*. Alasan yang lain ialah surat kabar *Nasional* memilih untuk tidak terbit karena mereka tidak ingin memberitakan berita mengenai Dewan Jenderal dan penerbitan surat kabar *Nasional* tidak mau mengkhianati haluan dasarnya sebagai surat kabar yang nasionalis.³⁶ Ketika hal ini terjadi, para pelanggan surat kabar *Nasional* sebenarnya sedikit kecewa karena surat kabar tersebut tidak terbit, sehingga para pembaca tidak dapat mengetahui peristiwa yang sebenarnya terjadi. Tetapi pasca terjadinya peristiwa tersebut, surat kabar *Nasional* terbit kembali, dan mulai memberitakan mengenai peristiwa G-30S/PKI, seperti ketika PKI dibubarkan, beritanya tercantum di surat kabar *Nasional* dengan bunyi “PKI Dibubarkan dan Dijatakan Terlarang”.³⁷ Informasi yang diberikan oleh surat kabar *Nasional* berperan penting bagi masyarakat Yogyakarta supaya tetap kondusif dalam

menanggapi mengenai keadaan yang sedang terjadi di Indonesia.³⁸

Pasca peristiwa tersebut, ketika masa transisi sekitar tahun 1966-1967, surat kabar *Nasional* berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Kali ini aspirasi mengenai pro dan kontra antara masyarakat yang ingin mempertahankan Orde Lama dengan masyarakat yang menginginkan adanya perubahan sistem pemerintahan yang baru.³⁹ Dalam hal ini, nantinya sistem pemerintahan akhirnya berganti dari Orde Lama menjadi Orde Baru. Pasca bergantinya Orde Lama menjadi Orde Baru, imbas dari kebijakan pemerintah yang baru adalah mengharuskan surat kabar *Nasional* mengganti namanya menjadi surat kabar *Suluh Indonesia* pada tahun 1967. Walaupun demikian, surat kabar *Nasional* tetap berusaha untuk memberikan kontribusi dan perannya sebagai media yang menyebarkan informasi kepada masyarakat Yogyakarta. Surat kabar tersebut tetap berperan untuk mengawal Indonesia dengan memberikan informasi-informasi ter-update serta terpercaya bagi masyarakat Yogyakarta.⁴⁰ Masyarakat Yogyakarta sebagai pembaca setia dari surat kabar *Nasional* pun menjadi semakin yakin dengan surat kabar tersebut, sebab meskipun berganti nama dan dalam kebijakan apapun, surat kabar *Nasional* tetap berusaha untuk mempertahankan haluan dasarnya sebagai surat kabar yang nasionalis, sehingga dapat memupuk rasa nasionalisme bagi para pembacanya. Hal ini dapat kita lihat bagaimana mereka

³⁶Phutut Wiryawan, Wawancara di Yogyakarta, 7 Januari 2019.

³⁷Surat kabar *Suluh Indonesia*, 14 maret 1966.

³⁸Phutut Wiryawan, Wawancara di Yogyakarta, 7 Januari 2019.

³⁹Surat kabar *Suluh Marhaen*, 26 Agustus 1966.

⁴⁰Surat kabar *Suluh Marhaen*, 29 Agustus 1966.

mengajak pelanggannya untuk tetap setia dalam surat kabar Nasional yang bertuliskan “Batjalah!! Ikutilah!! Milikilah!! Suluh Marhaen...”⁴¹

Memasuki masa Orde Baru, surat kabar-surat kabar di Indonesia mulai stabil dan stagnan dalam pemberitaannya. Hal ini dikarenakan pemerintah telah menertibkan segala surat kabar yang menentang ideologi Indonesia. Surat kabar *Nasional* pun dalam pemberitaannya menjadi stabil seperti surat kabar lainnya. Pembaca pun kembali dapat menikmati informasi yang diberikan oleh surat kabar *Nasional*, namun dalam hal ini masyarakat Yogyakarta mulai merasakan berita yang menjenuhkan karena informasi yang diberikan masih dalam kebijakan pemerintah yang mengharuskan berkoalisi dengan partai politik tertentu. Setelah dirasa mulai stabil, pada akhir tahun 1969 pemerintah mencabut kebijakan yang mewajibkan surat kabar yang berkoalisi dengan partai politik. Dicabutnya peraturan tersebut membuat surat kabar *Suluh Marhaen* mengubah namanya kembali menjadi *Nasional*, dan mulai tahun 1970 pemberitaan yang diberikan surat kabar mulai berkembang kembali, termasuk dari surat kabar *Nasional*. Maksudnya berkembang disini ialah pemberitaannya mulai bebas kembali, tidak terhalang dengan kebijakan-kebijakan yang diberikan partai politik. Surat kabar *Nasional* pun kembali menjadi surat kabar yang benar-benar memberitakan secara nasional. Masyarakat Yogyakarta yang membaca surat kabar *Nasional* pun menemukan kembali gairah dari surat kabar yang berhaluan nasionalis tersebut. Mereka mendapatkan berita yang berkompeten dan komprehensif.⁴²

⁴¹Surat kabar *Suluh Marhaen*, 20 Agustus 1966.

⁴²Phutut Wiryawan, Wawancara di Yogyakarta, 7 Januari 2019.

Semua peranan surat kabar *Nasional* yang berpengaruh bagi masyarakat di bidang sosial tidak lepas dari rasa untuk sesama. Konsistensi surat kabar *Nasional* dalam penerbitan beritanya menggugah rasa masyarakat Yogyakarta dalam mempercayai surat kabar tersebut.⁴³ Di sisi lain, berita-berita seperti periklanan dan bakti sosial dan kebudayaan sering kali membuat masyarakat Yogyakarta menjadi meningkat rasa sosialnya, seperti yang diwartakan dalam surat kabar *Nasional* yang berbunyi “Lomba Seni Suara Djawa di Gembira Loka...”⁴⁴

Kesimpulan

Pasca kemerdekaan kondisi persuratkabaran di Yogyakarta mulai terbit dengan wacana kemerdekaan yang diusung oleh masyarakat Yogyakarta. Pada masa agresi militer II di Yogyakarta, masyarakat di Yogyakarta sempat mengalami kondisi yang gelap informasi, sebab pada peristiwa ini penerbitan surat kabar di Yogyakarta diboikot oleh *NICA*. Walaupun demikian, surat kabar di Yogyakarta tetap terbit meski harus kejar-kejaran dengan tentara *NICA*. Pasca agresi militer II, kondisi persuratkabaran di Indonesia masih kacau, tetapi dapat pulih dengan perlahan. Setelah itu, pada tahun 1950 Indonesia memasuki sistem pemerintahan demokrasi liberal. Pada masa ini, surat kabar di Indonesia mulai ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan golongan. Hal ini terjadi hingga pemerintah mengeluarkan Kebijakan Darurat Perang tahun 1957. Pasca dikeluarkannya kebijakan tersebut, surat kabar mulai dapat distabilkan kembali oleh pemerintah. Hingga pemerintah mengeluarkan dekrit

⁴³Sobagijo I.N., hlm. 79.

⁴⁴Surat kabar *Nasional*, 26 Agustus 1966.

presiden pada 5 Juli 1959 dan memberlakukan kebijakan Surat Izin Terbit untuk mengendalikan persuratkabaran di Indonesia.

Surat kabar Nasional berkembang di Yogyakarta sejak kemunculannya di tahun 1946. Surat kabar ini berpengaruh di Yogyakarta, khususnya bagi orang-orang yang berhaluan nasionalis. Ini disebabkan surat kabar Nasional berhaluan dasar nasionalis. Tahun 1960, surat kabar di Yogyakarta mulai mengalami kendala-kendala yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah, sehingga mempengaruhi berita yang disampaikan kepada masyarakat. Keadaan ini terus berlanjut hingga terjadi peristiwa G30S/PKI. Pasca peristiwa tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa surat kabar harus berafiliasi dengan parpol atau langsung di bawah Kemenpan. Surat kabar Nasional memilih untuk berafiliasi dengan PNI. Selama berafiliasi, berita-berita yang disampaikan oleh surat kabar Nasional kebanyakan hanya mengenai PNI. Hal tersebut lambat laun berpengaruh kepada pembaca. Pembaca merasa jenuh karena isi beritanya hanya mengenai parpol, khususnya PNI. Tahun 1969, kebijakan berafiliasi akhirnya dicabut, sehingga surat kabar-surat kabar kembali bebas dalam pemberitaannya, termasuk surat kabar Nasional. Hal ini berpengaruh kepada gairah pembaca karena isi dari surat kabar telah kembali beragam. Hingga nantinya pemerintahan Orde Baru mulai mengalami berbagai kendala akibat pemberitaan media cetak, sehingga sedikit demi sedikit pers mulai dibatasi kembali.

Mulai awal kemunculan surat kabar Nasional, pengaruh yang diberikan oleh surat kabar Nasional sangat besar. Dalam hal ini, surat kabar Nasional sangat berpengaruh dalam memberikan informasi kepada masyarakat di Yogyakarta, sehingga setelah membaca surat kabar Nasional,

masyarakat Yogyakarta dapat mengetahui situasi yang sedang terjadi. Selain itu, kebijakan pemerintah juga mempengaruhi keberadaan surat kabar Nasional, ini dapat terjadi karena kebijakan pemerintah selalu mempengaruhi berita yang diterbitkan oleh suatu surat kabar, termasuk surat kabar Nasional di Yogyakarta. Kebijakan pemerintah berpengaruh bagi surat kabar Nasional, nantinya juga berpengaruh bagi pembaca surat kabar Nasional tersebut. Pembaca yang membacanya akan melakukan tindakan sesuai apa yang diberitakan oleh surat kabar Nasional dan akan mempengaruhi kebijakan pemerintahannya. Hal ini menjelaskan bahwa fungsi surat kabar ialah penyebar pengaruh dan informasi dan hal ini selalu berdampak bagi semua kalangan.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip:

Surat kabar *Nasional* 1 November 1960.

Surat kabar *Suluh Indonesia* 14 Maret 1966.

Surat kabar *Suluh Indonesia* 2 Juni 1966.

Surat kabar *Suluh Marhaen* 22 Juni 1966.

Surat kabar *Suluh Marhaen* 23 Juni 1966.

Surat kabar *Suluh Marhaen* 20 Agustus 1966.

Surat kabar *Suluh Marhaen* 26 Agustus 1966.

Surat kabar *Suluh Marhaen* 29 Agustus 1966.

- Buku:
- Abdurrachman Soerjomihardjo, dkk, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2002.
- _____, Kota Yogyakarta Tempo Doeloe; Sejarah Sosial 1880-1930, Depok: Komunitas Bambu, 2008.
- Ahmat Adam, *Sejarah Awal Pers Dan Kesadaran Keindonesiaan*, Jakarta: Hasta Mitra, 2003.
- Adi Sudirman, *Sejarah Lengkap Indonesia dari Era Klasi Hingga Terkini*, Yogyakarta: DIVA Press, 2014.
- Ambar Adriananto, dkk, *Peranan Media Massa Lokal Bagi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Daerah*, Yogyakarta: Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1997.
- Anwar Arifin, *Pers Dan Dinamika Politik*, Jakarta: Yarsif Watampone, 2010.
- Deliar Noor, *Pengantar ke Pemikiran Politik I*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta, *Menjadi Jogja: Memahami Jatidiri dan Transformasi Yogyakarta*, Yogyakarta: Panitia HUT ke-250 Kota Yogyakarta, 2006.
- Dharmono Hardjowidjono, *Replika Sejarah Perjuangan Rakyat Yogyakarta; Buku Ke-Dua*, Yogyakarta: Proyek Pemeliharaan Tempat Bersejarah Perjuangan Bangsa, 1984.
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI Press, 2008.
- Kuntwijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.
- Maters, Mirijam, *Dari Perintah Halus Ke Tindakan Keras*, Jakarta: Hasta Mitra, 2003.
- Mona Lohanda, *Membaca Sumber Menulis Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Nugroho Notosusanto, *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah*, Jakarta: Mega Book Store, 1984.
- Nurudin, *Sistem Komunikasi Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Pramoedya Ananta Toer, *Sang Pemula*, Jakarta: Hasta Mitra, 1985.
- Siraishi, Takashi, *Zaman Bergerak*, Jakarta: Grafiti, 1997.
- Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Soebagijo I.N., *Jagat Wartawan Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, 1981.
- Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Pribadi Dalam Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Tashadi, *Buku Kenangan 50 Tahun Republik Indonesia di Yogyakarta: Sebuah Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Panitia Gabungan Peringatan HUT ke-50 Kemerdekaan RI Bhakti

Pengaruh Surat Kabar ... (Rinaldi Bagaskara)

Pertiwi, 1995.

Sarekat Penerbit Surat Kabar, *Garis Besar Perkembangan Pers Indonesia*, Jakarta: Serikat Penerbit Surat Kabar, 1971.


Taufik, I., *Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia*, Jakarta: PT Triyinto, 1977.

Tim Majelis Tamansiswa, *Pendidikan dan Kebudayaan*, Yogyakarta: Majelis Luhur Tamansiswa, 1952.

Yogyakarta, Juli 2019

Dosen Pembimbing TAS

Reviewer


Dr. Miftahuddin, M. Hum.
NIP. 19740302 200312 1 006


Ita Mutiara Dewi, S.I.P., M. Si
NIP. 19810321 200312 2 001

